



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, xx xxxx 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (email): xxxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp 08xxxxxxxxxxxx,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, xx xxxx 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat kediamannya yang jelas namun masih berada di seluruh kawasan Republik Indonesia (Ghaib);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court), Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 1995 secara sah di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/XII/95 tanggal 27 November 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 26 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak binti Tergugat lahir di xxxxx, xx xxxx 1996;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2004;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Uang nafkah dari Tergugat kurang layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena Tergugat sering meminta uang nafkahnya kembali kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat menggunakan uang hasil kerja Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena masalah kecil dalam rumah tangga yang dibesar-besarkan oleh Tergugat sendiri, Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat di area badan dan muka Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2021 hingga sekarang selama 3 tahun 8 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat dan Tergugat dari tahun 2022 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat, maupun teman-teman Tergugat, namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjungan berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: xx/xxx/xxx-xx/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb, tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Agustus 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/XII/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 November 1995. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan kode (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: xx/xxx/xxx-xx/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 17 Januari 2025. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal serta paraf dan kode (P.3);

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx xxxx 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak dikaruniai anak hubungan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi akibat sikap Tergugat yang pelit memberi nafkah kepada Penggugat bahkan seringkali Tergugat meminta kembali uang nafkahnya yang ia berikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat turut bekerja sebagai karyawan disebuah warung makan;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat mudah marah bahkan seringkali menyakiti dengan menendang badan dan meninju area wajah Penggugat hingga tampak bekas memar kebiruan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga pernah melihat bekas memar di area wajah Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta tidak pernah sama sekali menghubungi atau berkomunikasi memberi kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama orangtuanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaan (tempat kediamannya) secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu diantara mereka sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx xxxxx 1985, agama Islam, pendidikan Diploma II (D II), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu satu kali dengan Penggugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak dikaruniai anak, mulai sering terjadi

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: masalah ekonomi, Tergugat sering meminta kembali uang nafkahnya yang ia berikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai karyawan di sebuah warung makan; dan Tergugat bersifat temperamen tinggi yang sering marah dengan menendang badan dan meninju wajah Penggugat hingga memar;

- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak dua kali saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat sejak tahun 2021 silam sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta tidak pernah sama sekali menghubungi atau berkomunikasi memberi kabar kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu diantara mereka sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) dengan NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/XII/95 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 27 November 1995, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 1995 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2004 karena: uang nafkah dari Tergugat kurang layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena Tergugat sering meminta uang nafkahnya kembali kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat menggunakan uang hasil kerja Penggugat; dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat karena masalah kecil dalam rumah tangga yang dibesar-besarkan oleh Tergugat sendiri, Tergugat juga sering memukul dan menendang Penggugat di area badan dan muka Penggugat;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2021 hingga sekarang selama 3 tahun 8 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat dan Tergugat dari tahun 2022 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya; sejak saat itu, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat; dan Penggugat telah berusaha mencari tau keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat, maupun teman-teman Tergugat, namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjungan berhasil ditemukan;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: xx/xxx/xxx-xx/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2022 tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, merupakan surat bukan akta, oleh Hakim Tunggal cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain, merupakan surat bukan akta, oleh Hakim Tunggal cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni kakak kandung Penggugat (ipar Tergugat) dan sepupu satu kali Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud dan bukti P.3;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 1 (satu) di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi I Penggugat pernah dua kali menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan juga pernah melihat bekas memar di area wajah Penggugat yang disebabkan karena masalah ekonomi akibat sikap Tergugat yang pelit memberi nafkah kepada Penggugat bahkan seringkali Tergugat meminta kembali uang nafkahnya yang ia berikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat turut bekerja sebagai karyawan di sebuah warung makan dan Tergugat mudah marah bahkan seringkali menyakiti dengan menendang badan dan meninju area wajah Penggugat hingga tampak bekas memar kebiruan. Adapun saksi II Penggugat pernah melihat sebanyak dua kali saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat sering meminta kembali uang nafkahnya yang ia berikan kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sebagai karyawan di sebuah warung makan; dan Tergugat bersifat temperamen tinggi yang sering marah dengan menendang badan dan meninju wajah Penggugat hingga memar. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat sebagaimana tercantum pada Pokok Gugatan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu sampai dengan sekarang; selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta tidak pernah sama sekali menghubungi atau berkomunikasi memberi kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama orangtuanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaan (tempat kediamannya) secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu diantara mereka sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan bukti P.3, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang; selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta tidak pernah sama sekali menghubungi atau berkomunikasi memberi kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan (tempat kediamannya) secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu diantara mereka sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa keluarga Penggugat

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta tidak pernah sama sekali menghubungi atau berkomunikasi memberi kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan (tempat kediamannya) secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu diantara mereka sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu *bai'n suhrah* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: **pertama**, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; **ketiga**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT; **keempat**, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kepada Penggugat serta tidak pernah sama sekali menghubungi atau berkomunikasi memberi kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan (tempat kediamannya) secara jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu diantara mereka sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban satu sama lain secara lahir dan batin selayaknya suami isteri, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan. Dengan demikian, **syarat kedua dan syarat ketiga tersebut telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat keempat tersebut pula telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena perkecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Azmi Noor Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Ktb